

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak Pemerintah Indonesia mengundangkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (masing-masing telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004), telah terjadi perubahan yang sangat drastis dari model pembangunan yang tersentralisasi menjadi model pembangunan desentralisasi. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang berisi tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sesuai dengan Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menjelaskan bahwa otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan pemberian otonomi daerah pada hakekatnya ditujukan untuk memberikan keleluasaan serta kesempatan kepada daerah untuk

menyelenggarakan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab dari mulai perencanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi. Dengan adanya otonomi daerah pemerintah diberi keluluasaan untuk mengelola sumber daya dan mempertanggung jawabkan kepada masyarakat sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah diperlukan adanya sistem desentralisasi secara transparan, efektif dan efisien dan dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat luas. Pertanggung jawaban pemerintah kepada publik yang bersih merupakan tuntutan yang harus dipenuhi oleh pemerintah, dimana untuk mewujudkannya memerlukan media tertentu. Salah satu alat untuk memfasilitasi tercapainya laporan keuangan pemerintah daerah yang kompetitif yaitu laporan keuangan pemerintah daerah tersebut digunakan untuk membandingkan kinerja keuangan yang akurat dengan anggaran, menilai kondisi dan hasil operasional, membantu menentukan tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang terkait dengan masalah keuangan dan ketentuan lainnya serta membantu mengevaluasi tingkat efisien dan efektivitas.

Pemberian hak otonomi daerah kepada pemerintah daerah berguna untuk menentukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sendiri sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah, mempertegas semakin diperlukannya pengelolaan keuangan yang baik dan benar, untuk melihat seberapa baik dan benarnya suatu pengelolaan keuangan maka perlu dilakukan pengukuran Kinerja Keuangan.

Untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah perlu ditetapkan standar atau acuan kapan suatu daerah dikatakan mandiri, efektif, efisien, dan akuntabel

sehingga diperlukan suatu pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah sebagai tolak ukur dalam penetapan kebijakan keuangan pada tahun anggaran selanjutnya. Pengukuran kinerja untuk kepentingan publik dapat dijadikan evaluasi dan memulihkan kinerja dengan pembandingan skema kerja dan pelaksanaannya.

Analisis kinerja keuangan pemerintah daerah, khususnya terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), maka analisis rasio yang dapat digunakan adalah analisis rasio keuangan pada APBD, antara lain rasio derajat desentralisasi, ketergantungan daerah, kemandirian, rasio efektivitas dan efisiensi pendapatan asli daerah, rasio keserasian belanja, dan rasio pertumbuhan sebagai alat analisis untuk mengetahui kinerja keuangan Pemerintah daerah. Analisis rasio keuangan pada APBD dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi (Halim:2007).

Untuk menilai kinerja keuangan pemerintah daerah dapat dilakukan dengan cara melihat kinerjanya melalui Laporan Realisasi Anggaran. Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam suatu periode pelaporan. Laporan Realisasi Anggaran juga menyediakan informasi yang berguna dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif.

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka penulis bermaksud melakukan penelitian yang berjudul: "**Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Padang (Studi Kasus pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang Tahun Anggaran 2013-2017)**"

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka dalam hal ini yang menjadi rumusan permasalahan adalah:

1. Bagaimana kinerja keuangan BPKAD Kota Padang jika dilihat dari Rasio Derajat Desentralisasi ?
2. Bagaimana kinerja keuangan BPKAD Kota Padang jika dilihat dari Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah ?
3. Bagaimana kinerja keuangan BPKAD Kota Padang jika dilihat dari Rasio Kemandirian Keuangan Daerah?
4. Bagaimana kinerja keuangan BPKAD Kota Padang jika dilihat dari Rasio Efektivitas ?
5. Bagaimana kinerja keuangan BPKAD Kota Padang jika dilihat dari Rasio Efisiensi ?
6. Bagaimana kinerja keuangan BPKAD Kota Padang jika dilihat dari Rasio Keserasian ?
7. Bagaimana kinerja keuangan BPKAD Kota Padang jika dilihat dari Rasio Pertumbuhan?

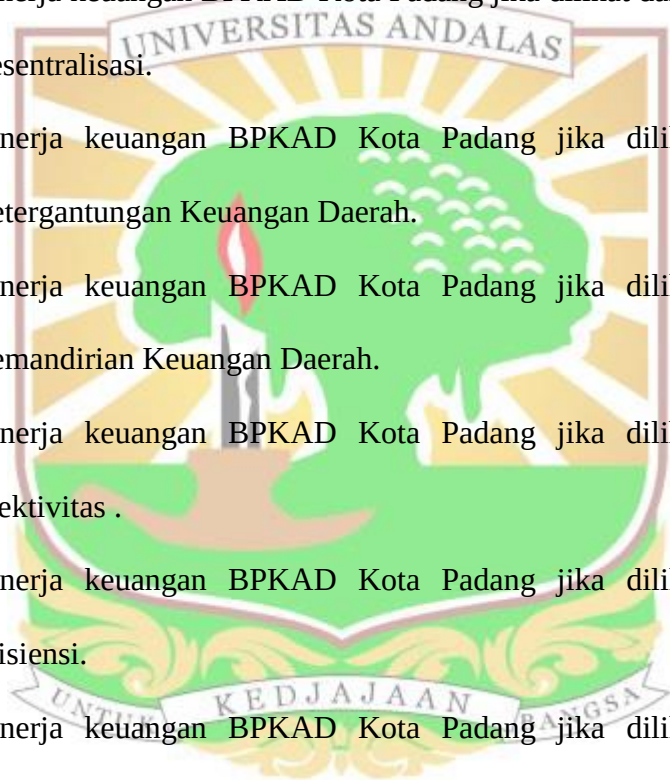


8. Bagaimana kinerja keuangan BPKAD Kota Padang jika dilihat dari Rasio DSCR?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Kinerja keuangan BPKAD Kota Padang jika dilihat dari Rasio Derajat Desentralisasi.
2. Kinerja keuangan BPKAD Kota Padang jika dilihat dari Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah.
3. Kinerja keuangan BPKAD Kota Padang jika dilihat dari Rasio Kemandirian Keuangan Daerah.
4. Kinerja keuangan BPKAD Kota Padang jika dilihat dari Rasio Efektivitas .
5. Kinerja keuangan BPKAD Kota Padang jika dilihat dari Rasio Efisiensi.
6. Kinerja keuangan BPKAD Kota Padang jika dilihat dari Rasio Keserasian.
7. Kinerja keuangan BPKAD Kota Padang jika dilihat dari Rasio Pertumbuhan.
8. Kinerja keuangan BPKAD Kota Padang jika dilihat dari Rasio DSCR.



D. Manfaat Penelitian

1. Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi pemerintah daerah dalam menentukan kebijakan dan strategi untuk perbaikan kinerja keuangan daerah.

2. Bagi Peneliti

Pengamatan ini dapat menambah pengetahuan mengenai pengukuran kinerja keuangan daerah.

E. Sistematika Penulisan

Penulisan Skripsi ini dengan judul Analisa Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Padang Tahun Anggaran 2013-2017 dalam lima bab, dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi penjelasan mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi penjelasan yang berkaitan dengan penelitian ini.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini meliputi jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, metode pengumpulan dan sumber data, metode pengolahan dan analisis data .

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan menyajikan analisis dan pembahasan perkembangan keuangan daerah Pemerintah Kota Padang yang ditinjau dari rasio derajat desentralisasi, ketergantungan, kemandirian, efisiensi, efektivitas, keserasian, pertumbuhan dan *Debt Service Coverage Ratio*.

BAB V PENUTUP

Bab ini membahas kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil penelitian. Serta beberapa saran yang dapat diharapkan bisa berguna bagi Pemerintah Kota Padang dan rekomendasi untuk penelitian selanjutnya.

